

ABSTRAK

Adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial biasanya dipicu oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi. Salah satu bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu anak jalanan. Anak jalanan hadir karena ketidakmampuan keluarga/ orangtua untuk memenuhi hak – hak dasarnya, sebagai korban diterlantarkan, diksriminasi, maupun dorongan dari keluarga. Sehingga timbul keinginan anak untuk memiliki uang sendiri untuk membantu perekonomian keluarga. Penanganan pmks berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah melakukan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya penanganan pmks anak jalanan di Kota Bandung dihubungkan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan UUPPLH Nomor 32 tahun 2009, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara. Maka dari itu, tidak seorang pun dapat mengganggu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap manusia. Implementasi dilakukan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan dan rehabilitasi. Keberadaan anak jalanan secara tidak langsung memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan hidup karena dapat mencemari, mengganggu keestetikaan lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dan meneliti berdasarkan bahan – bahan hukum primer dan sekunder, spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum yaitu deskriptif – analitis berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, metode dan teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan hasil penelitian lalu dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan maupun asas – asas hukum terkait permasalahan yang diteliti yang disusun secara sistematis untuk dapat dianalisis agar memperoleh kesimpulan.

Terdapat hambatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya dalam aspek sumber daya manusia, Dinas Sosial Kota Bandung kekurangan personil dalam menangani permasalahan anak jalanan dan sumber daya dari segi fasilitas Dinas Sosial belum memadai dikarenakan pembangunan pusat kesejahteraan sosial belum sepenuhnya selesai sehingga banyak anak jalanan yang sudah ditertibkan oleh pihak Satpol PP kembali lagi turun ke jalan. Sedangkan anak jalanan yang mengemis yang berasal dari luar Kota Bandung biasanya mereka dipulangkan kembali ke kampung halamannya masing-masing tanpa ada pengawasan setelah itu hanya pihak keluarga yang dapat mengawasi.

Kata Kunci : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, PMKS, Hak Atas Lingkungan

ABSTRACT

The existence of people with social welfare problems is usually triggered by low family economic factors and high poverty rates. One part of people with social welfare problems, namely street children. Street children exist because of the inability of their families / parents to fulfill their basic rights, as victims of neglect, discrimination, or encouragement from their families. So that arises the desire of children to have their own money to help the family economy. Handling PMKS based on Regional Regulation of the City of Bandung Number 5 of 2015 concerning the implementation and handling of social welfare, the Regional Government carries out a mechanism of guidance, supervision and control of social welfare services. In its implementation, the handling of PMKS street children in Bandung City is linked to the right to a good and healthy environment based on UUPPLH Number 32 of 2009, the right to a good and healthy environment is the basic right of every citizen. Therefore, no one can interfere with the right to a good and healthy environment for every human being. Implementation is carried out through guidance, supervision and rehabilitation mechanisms. The existence of street children indirectly has a bad impact on the environment because it can pollute, disrupt the aesthetics of the environment and have an impact on public health.

The research method used is through the normative juridical approach by studying and researching based on primary and secondary legal materials, research specifications in legal research, namely descriptive - analytical based on the provisions of applicable laws and regulations, methods and techniques of data collection through library data, The analytical method used in this research is qualitative based on the results of the research and then linked to the provisions and legal principles related to the problems under study which are arranged systematically to be analyzed in order to obtain conclusions.

There are obstacles in the handling of people with social welfare problems, especially in the aspect of human resources, the Bandung City Social Service lacks personnel in dealing with street children problems. Resources in terms of facilities for the Social Service are inadequate because the construction of a social welfare center has not been fully completed so that many street children who have been disciplined by the Satpol PP have returned to the streets. Meanwhile, street children who beg from outside Bandung are usually sent back to their hometowns without any supervision. After that, only the family can monitor them.

Keywords: Persons with Social Welfare Problems, PMKS, Rights to the Environment